

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Manan, 2019, *Pengadilan Agama Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*, Kencana, Malang
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Desse Yussubrastra dkk, 2019, *Buletin Cagar Budaya Dua Mata Pisau : Mengelola Warisan Budaya Sebagai Produk Wisata*, Jakarta, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Jakarta
- Dwi Putranto Riau, 2019, *Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung*, Zifatama Jawara, Sidoarjo
- Galang Taufani Suteki, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Halilul Khairi, 2017, *Dinamika Pelaksanaan Urusan dibidang Persandian Pemerintah Daerah*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta
- H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung
- Ign Eka Hadiyanta, 2017, *Dinamika Pelestarian Cagar Budaya*, Penerbit Ombak, Yogyakarta
- Joeniarto, 1992, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Bumi Aksara, Jakarta
- Joni Purwohandoyo dkk, 2018, *Pariwisata Kota Pusaka: Mendayagunakan Aset Pusaka, Menyejahterakan Masyarakat*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Kamal Hidjaz, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar
- Marihot Pahala Siahaan, 2008, *Hukum Bangunan Gedung di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Muluk, MR Khairul, 2009, *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*, ITS Press. Surabaya.
- Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta
- Tim Penulis Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, 2020, *Dinamika Hukum dalam Paradigma Das Sollen dan Das Sein*, Intelegensia Media, Malang

B. UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya Yang Dilestarikan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli

Bangunan Gedung

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan

Pelestarian Cagar Budaya

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Cagar Budaya

SK Wali Kota Padang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penetapan Bangunan Cagar Budaya dan Kawasan Bersejarah di Kota Padang

C. SKRIPSI

Heinrich Triepel, dalam Sodjuangon Situmorang, *Model Pembagian Urusan Pemerintahanantara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota*. Disertasi, PPS Fisip UI, Jakarta.2002. hlm. 104.

D. INTERNET

<http://eprints.umpo.ac.id/2806/1/2.%20BAB%201.pdf>. Diakses pada tanggal 3 Maret 2020 pukul 23.10 WIB

<http://padang.go.id/konten/sejarah-kota-padang>. Diakses pada tanggal 7 Maret 2020 pukul 17.05 WIB

<https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/lestari/html>. Diakses pada tanggal 14 September 2020 pukul 21.25 WIB

<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta/merawat-cagar-budaya-mengelola-jejak-peradaban/>. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2020, pukul 10.00 WIB.

